PANDUAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PERKOTAAN (SPAL-DP)

BUKU I
PENJELASAN UMUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

PANDUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN (SPAL-DP)

BUKU I
PENJELASAN UMUM

PENGANTAR

"Dalam rangka peningkatan institusionalisasi layanan air limbah domestik, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama mitra melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan terbentuk operator air limbah domestik dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)."

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib Pemerintah Daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 juga menyatakan pencapaian universal akses sanitasi pada tahun 2019.

Menjawab tantangan universal sanitasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses air limbah domestik berupa pembangunan infrastruktur air limbah di kabupaten/kota yang meliputi sistem pengelolaan air limbah setempat (*on-site system*), sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off-site system*) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Agar sistem pengelolaan air limbah ini dapat berkelanjutan maka harus disertai dengan komponen pendukung yaitu regulasi air limbah domestik, institusionalisasi layanan, penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi pelayanan, serta kebijakan pendanaan maupun penagihan retribusi pelanggan.

Dalam rangka peningkatan institusionalisasi layanan air limbah domestik, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama mitra melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan terbentuk operator air limbah domestik dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD yang telah

terbentuk perlu dibina sehingga terjadi peningkatan kompetensi dan kapasitas baik itu sumberdaya manusia, manajemen operasi asset, manajemen pelanggan dan manajemen pendapatan.

Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas UPTD air limbah domestik tersebut, Direktorat Pengembangan PLP bersama USAID IUWASH telah menyusun sejumlah materi referensi berdasarkan pengalaman implementasi lapangan, berupa, antara lain: 1) Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, 2) *Flipchart* dan Buku Saku Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, 3) *Flipchart* dan Buku Saku Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat - Skala Permukiman, 4) Panduan Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan. Selain UPTD, materi ini dapat juga dipergunakan oleh dinas terkait maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik masing-masing wilayah serta dapat disesuikan dengan kondisi dan karekteristiknya daerah masing masing.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu menyusun materi ini. Semoga materi ini memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Terima kasih.

Jakarta, Maret 2016
Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc

SAMBUTAN USAID IUWASH

FOREWORD

Tantangan air limbah domestik di perkotaan Indonesia akan semakin komplek selaras dengan percepatan pertambahan jumlah penduduk dan luasan permukiman. Untuk menjawab tantangan di sektor sanitasi tersebut perlu perhatian dari pemangku kepentingan terhadap berberapa dimensi yaitu perencanaan tata ruang, peratuarn dan kelembagaan, pilihan teknologi, keuangan investasi dan biaya operational/pemiliharan, social kebudayaan, dan manajemen layanan.

Dalam dimensi tata ruang dan pilihan teknologi diperlukan kerangka kebijakan dalam pentekatan pengembangan rencana tata ruang yang memadukan beragam pilihan teknologi, seperti sanitasi setempat (termasuk layanan penyedotan tangki septik, pengolahan dan pembuangan lumpur tinja yang tepat), dan sistem perpipaan skala terpusat.

Secara sederhana, semakin padat dan besar pertumbuhan suatu kota, diperlukan penerapan teknologi yang lebih tinggi tingkatannya, yang akan berpengaruh terhadap kualitas efluen lebih baik. Dengan kata lain, teknologi yang rendah menyisakan tingkat pencemaran yang tinggi dan memerlukan lahan yang lebih luas, sementara itu teknologi yang lebih tinggi menyisakan tingkat pencemaran yang lebih rendah serta kebutuhan lahan yang lebih kecil. Oleh karena itu, untuk memastikan kondisi lingkungan yang sehat, perkotaan yang tumbuh pesat perlu diperkenalkan dengan pilihan teknologi yang lebih efektif dari segi mutu efluen dan biaya. Namun demikian, pilihan teknologi harus terkait dengan kemampuan dalam hal biaya belanja dan biaya operasional, dari sisi dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pilihan teknologi perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari kelompok sasaran serta kemampuannya untuk berpartisipasi.

The challenges and complexity of domestic wastewater management within the Indonesian urban context will increase with the acceleration of population growth and density. In addressing these challenge of the sanitation sector more attention needs to be given to a some key dimensions, comprising spatial planning, regulatory and institutional settings, selection of technologies, financing of investments and operations, social and culture, and services management.

In the dimension of spatial planning and technology options, it is necessary for the government to make a framework available that is integrating the various available options, such as on-site sanitation (and associated regular desluding of septic tanks, treatment and disposal of domestic septage), and off-site sewer systems, into the outline of the city's spatial development plans.

The rule of thumb is that the denser and bigger a city is growing, the higher becomes the level of applied technology, which is immensely impacting on the quality level of residual effluent. In other words, lower technology produces higher levels of pollution and requires more space, whereas higher technology produces lower levels of environmental pollution and needs less space.

Hence, for keeping environmental health conditions under control, rapid growing municipalities need to get familiarized with the introduction more effective choices of technologies in terms of residual pollution and costs.

However, the choice of technology must be link to affordability in terms of capital expenditures and operational expenditures by both the government and the communities at large. Hence, the choice of technology needs to consider socio-economic conditions of the target groups and their capacity to participate.

Karena pelayanan sanitasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat kota, pemerintah perlu memadukan masyarakat rentan dan terpingggirkan ke dalam rantai layanan, dapat dengan pemberian subsidi langsung maupun dengan pengaturan subsidi silang.

Terakhir pilihan teknologi sangat mempengaruhi persyaratan dan tingkat manajemen yang memadai untuk pemanfaatan terbaik teknologi yang tersedia dan untuk menyediakan layanan terbaik kepada masyarakat, yang kemudian akan berdampak positif pada kondisi penyehatan lingkungan dan perlindungan sumber air baku. Meskipun ada bukti yang baik untuk sistem sanitasi yang dikelola masyarakat, sistem ini tidak berkelanjutan jika diterapkan dalam jumlah besar dan dalam keadaan sosial dan/atau teknis menantang.

Dengan kata lain: *Teknologi yang dipilih adalah hanya sebaik sistem manajemen di balik itu - itu adalah untuk mengamankan operasi dan pemeliharaan teknologi yang digunakan.*

Dalam 25 tahun ke depan dapat dipastikan bahwa pengelolaan air limbah domestik perkotaan di Indonesia akan didominasi oleh sistem rumah tangga individu, disamping peningkatan jumlah sistem perpipaan terpusat, mulai dari kecil, dan menengah, hingga besar. Tidak akan ada kota di Indonesia yang akan melayani warganya dengan sistem air limbah domestik terpusat semata, melainkan akan dilayani dengan keragaman pilihan teknis.

Dan karena keragaman pilihan layanan dan kebutuhan untuk merencanakan, merancang, membangun dan mengoperasikan sistem sistem tersebut secara terpadu untuk memberikan layanan yang lebih efektif untuk perluasan serta

Whereas good sanitation practices need to reach all levels of the urban community, governments need to integrate vulnerable and marginalized households into the service chain, either through the provision of direct subsidies or cross-subsidy arrangements.

Lastly the choice of technology is very much influencing the requirements and level of sophistication of management for best utilizing available technologies and for providing best possible services to the communities, which would then, in return, positively impact on environmental health conditions and the protection of raw water sources. Whereas there is available good evidence for community managed sanitation systems, these systems are not sustainable if applied in large numbers and in challenging social and/or technical circumstances.

In other words: The selected technology is only as good as the selected management system behind it - that is to secure appropriate operations and maintenance of technologies that were put in place.
Looking into the next 25 years it can be said with confidence that urban wastewater treatment in Indonesia will be dominated by individual household systems besides an increasing number of piped systems, which are ranging from small, to medium, to large. In any case there will be no Indonesian city that will serve their citizens with a single sewerage system, rather than having to deal with a diversity of technical options. And because of the diversity of service options and the need to plan, design, build and operate those systems in an integrated manner for providing more effective services to expanding cities and a constantly increasing number of urban dwellers, there is only one option but to build an institutional framework that allows the development of professional infrastructure and service management,

SAMBUTAN USAID IUWASH

pertumbuhan penduduk kota, hanya ada satu pilihan yaitu membangun kerangka kerja kelembagaan yang memungkinkan pengembangan infrastruktur dan manajemen pelayanan secara profesional, didukung oleh fungsi regulasi yang perlu diberikan melalui lembaga pemerintah dan keterlibatan forum masyarakat.

Buku *Panduan Sanitasi Perkotaan* ini memberikan ilustrasi pilihan berdasarkan pengalaman lapangan yang dapat direplikasi, atau paling tidak dipertimbangkan sebagai referensi, dalam menyikapi tantangan perkotaan sekarang dan masa yang akan datang dalam pengelolaan air limbah domesik. Pada intinya panduan ini memiliki visi mengejar kesetaraan layanan dan keterjangkauan yang menyediakan, selama periode waktu tertentu, peningkatan layanan terhadap peningkatan jumlah penduduk yang didorong oleh pendekatan pembangunan skala kota dan dengan memberi mandat pengembangan kapasitas manajemen yang memadai yang bertanggung jawab atas pengelolaan pilihan teknologi yang tersedia dalam kota tersebut.

Semoga panduan ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Maret 2016
USAID IUWASH

FOREWORD

supported by regulatory oversight functions which needs to be provided through government agencies and citizen engagement.

This "Urban Sanitation Guideline" is illustrating field tested options that can be replicated, or at least considered as references, in the quest of responding to current and future urban challenges of wastewater management. In its core this guideline is guided by the vision of pursuing service equality and affordability that is providing, over a period of time, an increasing level of services to an increasing number of citizens driven by a "city-wide" development approach and by mandating the development of adequate resources and capacities to manage available service delivery technologies and options that are made available in a given municipality.

It is trusted that this guideline provides benefits to the parties concerned.

Jakarta, March 2016
USAID IUWASH

IPAL Komunal Tanjung Merdeka, Makassar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
SAMBUTAN IUWASH iii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR SINGKATAN viii
DAFTAR BUKU DALAM PANDUAN ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tantangan dan Perluang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan di Indonesia 2
1.3 Panduan Pengembangan SPAL-DP 3

BAB 2 KONSEP PENGELOLAAN SPAL-DP 6
2.1 Prinsip Dasar 6
2.2 Kerangka Konsep SPAL-DP 6
2.3 Kondisi Keberlanjutan yang Diharapkan 9
2.4 Nilai dan Manfaat Bagi Daerah 10
2.5 Kerangka Umum Integrasi Gender 12

BAB 3 PELAKSANAAN KERANGKA KERJA SPAL-DP 15

BAB 4 RINGKASAN BUKU PANDUAN 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matrik Kegiatan Operasionalisasi "Menuju Kinerja Pelayanan SPAL-DP" 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Kerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan 7
Gambar 2 Tata Kelola Pelayanan Publik 9
Gambar 3 Bagan Alir Pelaksanaan Kerangka Kerja SPAL-DP 16

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AKKOPSI	Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi
Balai TAMS	Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi
BABS	Buang Air Besar Sembarangan
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPKP	Badan Pemeriksa Keuagngan Pembangunan
CAPEX	*Capital Expenditure*
CSR	*Corporate Social Responsibility*
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU	Dinas Pekerjaan Umum
RTRW	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah
EHRA	*Environment and Health Risk Assessment*
GOI	*Government of Indonesia*
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IUWASH	*Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene*
Kemen PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KK/RT	Kepala Keluarga/Tumah Tangga
KPS/KPP	Kelompok Pengelola Sarana/Kelompok Pengguna dan Pemanfaat
LH	Lingkungan Hidup
MFI	*Micro Finance Institution* (koperasi, Bank Perkreditan Rakyat)
MDGs	*Millenium Development Goals*
MOU	*Memorandum of Undertanding*
O&M / O&P	*Operation and Maintenance* / Operasi dan Pemeliharaan
OPEX	*Operation Expenditure*
PD	Perusahaan Daerah
PERDA	Peraturan Daerah
PERMEN	Peraturan Menteri
PLP	Penyehatan Lingkungan Permukiman
RIA	*Regulatory Impact Assessment*
RKA SKPD	Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD
RKPD	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	Sumber Daya Manusia
sAIIG	*Australia Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation*
SAN	*Sanitation/Sanitasi*
SE	Surat Edaran
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Pembangunan Daerah
SOP	*Standard Operation Procedure*
SPAL-S	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
SPAL-T	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
SPAL-DP	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan
SSK	Strategi Sanitasi Kota
TUPOKSI	Tugas Pokok dan Fungsi
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	Undang Undang
USDP	*Urban Sanitation Development Program*
USAID	*United State Agency for International Development*
WUSAN	Wirausaha Sanitasi
WSP	*Water and Sanitation Program (of the World Bank)*

Daftar Buku Dalam "Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP)"

Buku yang tercakup dalam "Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) terdiri dari lima buku yang disusun secara sistematis dengan struktur sebagai berikut:

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP)

BUKU 1: PENJELASAN UMUM PENGEMBANGAN SPAL-DP

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai konsep kerangka kerja SPAL-DP dan bagaimana konsep ini dioperasionalkan oleh daerah untuk mencapai kinerja pelayanan, serta menjelaskan panduan-panduan yang digunakan dalam pendampingan kepada daerah. Isi buku 1 mencakup:

- Konsep SPAL-DP
- Proses Operasionalisasi Kerangka Kerja SPAL-DP
- Panduan yang digunakan
- Ringkasan isi buku panduan

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP)

BUKU 2: ADVOKASI PENGEMBANGAN SPAL-DP

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai proses penjaminan kualitas pelaksanaan kerangka kerja SPAL-DP untuk memastikan konsep pelaksanaan diadopsi secara utuh baik oleh pemerintah daerah, SKPD maupun UPTD SPAL-DP. Buku ini menjadi buku penunjang dari buku 3,4 dan 5. Isi buku ini mencakup:

- Konsep Advokasi dalam Pelaksanaan SPAL-DP
- Kerangka Kerja Advokasi Pelaksanaan SPAL-DP
- Advokasi untuk Pengambil Kebijakan Daerah
- Advokasi untuk SKPD

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP)

BUKU 3: PENYUSUNAN ROADMAP SPAL-DP

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai proses penyusunan Rencana Operasional secara menyeluruh dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan SPAL-DP oleh Pemerintah Daerah berangkat dari kondisi eksisting sebagai dasar penetapan target kondisi mendatang yang diharapkan serta gambaran strategi, program dan kegiatan. Isi buku ini mencakup:

- Kajian Kondisi Eksisting Pengelolaan SPAL-DP
- Penetapan Target SPAL-DP Yang Diharapkan Mendatang
- Rencana Kerja Operasional Pencapaian Kondisi SPAL-DP Yang Diharapkan Mendatang.

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP)

BUKU 4: DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SPAL-DP

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai dukungan dari Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untuk efektivitas pengelolaan air limbah domestik perkotaan mencakup aspek peraturan, perencanaan, pengawasan, lembaga operator dan kebijakan subsidi dan retribusi. Isi buku ini mencakup:

- Penyediaan Peraturan Pengelolaan SPAL-DP
- Rencana Operasional Pencapaian Kinerja SPAL-DP
- Pengawasan Penyelenggaraan SPAL-DP
- Lembaga Operator pelayanan air limbah domestik
- Kebijakan Subsidi/Retribusi Pelayanan SPAL-DP

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP)

BUKU 5: OPERASIONAL PELAYANAN SPAL-DP

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai aspek manajemen Lembaga Operator dalam menjalankan TUPOKSI nya sebagai lembaga operator dalam rangka memenuhi target kinerja khususnya dalam pencapaian cakupan dan mutu pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat. Buku ini menuntun kepada Lembaga Operator mengenai upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan mandatnya, isi buku ini mencakup:

- Konsep UPTD dalam Pengelolaan SPAL-DP; *Mandat, Tupoksi, Standar Pelayanan, Hak dan Kewajiban dan Kerangka Kerja.*
- Kompetensi Lembaga Operator UPTD dalam Pengelolaan SPAL-DP: Manajemen dan Administrasi, *Manajemen SDM, Manajemen Aset, Manajemen Pelanggan, Manajemen Keuangan, Pelaporan Kinerja Pelayanan*

Pembangunan tangki septik upflow filter di Kabupaten Pinrang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

"Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan menjadi kewajiban daerah."

Didorong oleh Tujuan Pembangunan Milenium Pemerintah Indonesia (RI) menetapkan target "Akses Universal 100-0-100" (akses Air Minum 100%, Kawasan Kumuh 0% dan Akses Sanitasi 100%), Pemerintah Indonesia telah meningkatkan secara signifikan alokasi anggaran untuk sektor air limbah dan terus memberikan arah kebijakan yang memungkinkan daerah dapat memanfaatkan peluang-peluang baru dalam memenuhi kewajiban mereka untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah perkotaan.

"Pendekatan yang digambarkan dalam seri pedoman ini didasarkan pada pengalaman lapangan yang dikumpulkan selama implementasi program IUWASH di 54 pemerintah daerah berpartisipasi selama periode tahun 2014/15."

Dukungan pembiayaan dari USAID untuk program *Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene* (IUWASH), yang dilaksanakan antara tahun 2011 dan 2016 – bekerjasama dengan lembaga pemerintah pusat, khususnya dengan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementrian Kesehatan, dan Kemetrian Dalam Negeri dan lembaga donor lainnya (USDP, WSP, SNV)-- untuk membantu pelaksanaan program di 54 Kota/Kabupaten dalam memasukkan program ke dalam kebijakan, strategi dan rencana jangka menengah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan.

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (selanjuntnya disingkat Panduan SPAL-DP) ini disusun berdasarkan pengalaman IUWASH di lapangan, dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategi yang komprehensif tetapi secara praktis dapat dilaksanakan untuk menerjemahkan sasaran pencapaian akses sanitasi di Indonesia. Pendekatan SPAL-DP ini dibutuhkan untuk visi pembangunan yang terukur dan pemikiran jangka panjang yang akan mempercepat terwujudnya manfaat pengelolaan air limbah perkotaan untuk:

- Masyarakat menikmati **peningkatan gaya hidup** dan kenyamanan sanitasinya dan diuntungkan setiap saat dalam perbaikan kondisi peyehatan lingkungannya;
- Sektor **swasta terlibat** dalam penyediaan layanan melalui kegiatan berbasis bisnis; dan
- Dampak **prestasi pemerintah daerah** meningkat sebagai kota yang bersih dengan meningkatkan cara pandang dan komitmen terhadap ketentuan layanan dasar yang menguntungkan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pendekatan yang diuraikan dalam kerangka pelaksanaan SPAL-DP adalah bersifat inklusif melibatkan semua lapis sosial masyarakat perkotaan, dengan demikian dapat diyakini bahwa pendekatan ini akan memberikan tingkat kesetaraan dan manfaat terbaik bagi masyarakat luas, termasuk kelompok miskin kota.

Strategi, pendekatan, dan rekomendasi yang disajikan dalam panduan sanitasi perkotaan ini perlu dipahami dan digunakan oleh pihak-pihak atau lembaga bersangkutan hanya sebagai referensi saja, karena kondisi keragaman masyarakat dan potensi pemerintah berbeda di setiap daerah. Untuk itu, dalam penggunaannya perlu penyesuaian dengan kondisi spesifik dan aspirasi daerah target pendampingan.

1.2 Tantangan dan Perluang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan di Indonesia

"Perlu langkah strategis untuk peningkatan layanan Air Limbah Domestik Perkotaan."

Bidang dan layanan Sitem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan' (SPAL-DP), telah mendapat perhatian cukup besar dari Pemerintah Indonesia dengan ditetapkannya target 100 % akses masyarakat terhadap sanitasi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2015-2019. Dalam laporan MDGs disebutkan, cakupan sanitasi di Indonesia pada tahun 2012 telah mencapai 71% dan masih memiliki perluang untuk meningkatkan cakupan

akses sanitatsi sebesar 39% untuk pemenuhan akses 100% pada tahun 2019.

Tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam pemenuhan akses dan layanan sanitasi secara berkelanjutan adalah:

- Walaupun tingkat akses ke sanitasi secara statistik relatif tinggi, **rendah tingkat pengolahan** air limbah domestik yang telah diolah sesuai dengan baku mutu nasional yang berlaku (biasanya <5%) [1],
- Perlu **meningkatan kesadaran umum** terhadap resiko sanitasi yang buruk terhadap ekonomi masyarakat dan kesehatan lingkungan,
- Perlu **pencapaian sinergi antar pihak** terkait dalam penanganan sektor sanitasi,
- Perlu **dukungan pemerintah daerah** dari segi persiapan peraturan, perencanan terpadu, institutionalisasi pelayanan, serta investasi untuk bidang SPAL-DP,
- Di saming target "Universal Akses 2019" perlu mengembangkan **strategi, pedoman praktis, dan insentif** untuk meningkatkan ketentuan layanan air limbah di tingkat pemerintah daerah.

1.3 Panduan Pengembangan SPAL-DP

"Panduan ini dapat digunakan dalam memfasilitasi pemangku kebijakan dan pejabat teknis (SKPD) serta lembaga operator untuk mencapai kinerja pelayanan SPAL-DP."

Panduan ini merupakan alat bantu dalam pelaksanaan kerangka kerja SPAL-DP terdiri dari lima buku diperuntukkan bagi semua pihak yang berkepentingan dan peduli terhadap SPAL-DP.

Untuk tujuan praktis panduan ini dapat digunakan oleh petugas proyek di lapangan dalam memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis kepada pemangku kebijakan dan pejabat teknis (SKPD) serta lembaga operator dalam memahami konsep SPAL DP dan mengoperasionalkan

1) Lihat Surat Edaran LH Desember 2014 yang menyatakan bahwa 75% dari semua badan air di Indonesia sangat tercemar hasil air limbah domestik yang tidak dikelola.

kerangka konsep ke dalam rencana dan aksi untuk mencapai kinerja pelayanan SPAL-DP.

Panduan ini juga akan memberikan manfaat bagi pemangku kebijakan dan pejabat teknis sebagai rujukan dan panduan dalam menjalankan perannya dalam proses adopsi konsep SPAL-DP. Dengan demikian Panduan ini memberikan manfaat ganda baik bagi petugas pendamping dan sasaran pendampingan.

Sedot tinja oleh perusahaan swasta yang bekerjasama dengan PDAM Surakarta

BAB 2 KONSEP PENGELOLAAN SPAL-DP

2.1 Prinsip Dasar

Pelaksanaan konsep kerangka kerja Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

Pemerintah Dearah bertanggungjawab

Atas dasar UU 23/2014 bentuk tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan kerangka peraturan, pengawasan dan menyediakan kelembagaan serta kebijakan subsidi/retribusi. Bentuk tanggung jawab ini dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dan tindak lanjutnya.

Mandat pengelolaan oleh lembaga operator

Lembaga operator adalah lembaga yang diberi mandat secara khusus untuk menjalankan fungsi manajemen pengelolaan air limbah domesik dan layanan kepada masyarakat, serta mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada pemerintah. Dalam hal ini lembaga operator wajib kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, serta wira usaha swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan air limbah domestik perkotaan.

Pemulihan biaya operasi dan pemeliharaan

Prinsip pemulihan biaya pada intinya membangun rasa tanggungjawab masyarakat dalam ikut menjamin keberlanjutan pengelolaan pengelolaan SPAL-DP. Hasil retribusi dari masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasioal dalam rangka peningkatakan kualitas pelayanan.

2.2 Kerangka Konsep SPAL-DP

"Pengelolaan SPAL-DP yang terpadu dan bersifat menyeluruh."

Untuk mendukung pengembangan dan penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik perkotaan yang berkelanjutan, IUWASH mengembangkan pendekatan yang komprehensif, namun praktis yang telah teruji di lapangan, yang disebut dengan "Kerangka Kerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan" untuk memandu pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan

infrastruktur air limbah. Dalam gambar 1 dari empat blok bangunan dalam satu rangkaian kerangka, pada intinya memberikan gambaran bahwa elemen elemen pelaksanakaan kerangka kerja SPAL-DP didorong oleh dua cita-cita ideal yaitu:

- Konsep **terpadu** adalah melibatkan seluruh unsur dari sistem air limbah domestik di wilayah perkotaan meliputi skala rumah tangga, skala komunal/ permukiman, skala terpusat, serta pengelolaan lumpur tinja domestik.
- Konsep **menyeluruh** adalah melibatkan aspek fungsi sarana dan prasarana, regulasi dan kebijakan, perencanaan, kelembagaan serta peran wira usaha swasta dan masyarakat sebagai satu kesatuan manajemen pengelolaan.

Gambar 1: Kerangka Kerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan

Keterangan dari masing-masing kotak dalam gambar kerangka kerja SPAL-DP di atas adalah sebagai berikut:

Lingkungan Pendukung

Lingkungan Pendukung dari Pemda sebagaimana digambarkan dalam kotak oranye pada prinsipnya menyangkut akuntabilitas pemerintahan, percepatan belanja modal dan pembiayaan O&P, dukungan regulasi dan penegakan pelaksanaannya, dan pengaturan kelembagaan yang memadai merupakan pendorong utama pembangunan dan kesetaraan akses dalam meningkatkan layanan sanitasi di perkotaan

Komunikasi Perubahan Perilaku

Komunikasi Perubahan Perilaku sebagaimana kotak merah adalah upaya untuk memicu terjadinya perubahan perilaku yang baik dalam sanitasi, "menciptakan permintaan (rasa butuh) masyarakat" dan "rantai pasok" untuk fasilitas dan layanan sanitasi melalui keterlibatan pemerintah daerah, penyedia keuangan mikro (bank , koperasi), UKM, masyarakat, dan rumah tangga untuk meningkatkan cakupan akses masyarakat terhadap sanitasi, serta untuk mempromosikan kesehatan dan penggunaan yang tepat dan pemeliharaan fasilitas.

Sarana dan Prasarana Layanan Air Limbah Rumah Tangga

Sarana dan Prasarana Layanan Air Limbah Rumah Tangga (SAN-1 s/d SAN-4) sebagaimana kotak hijau merupakan pilihan pela-yanan masyarakat yang telah tersedia pada umumnya adalah jamban (SPAL-D sistem rumah tangga) dan pada tingkat lebih rendah melalui sistem komunal dan terpusat atau "*off-site*" *system*. Jasa manajemen lumpur tinja terpadu, yang terdiri dari penyediaan tangki septik sesuai standar, koleksi lumpur tinja, transportasi, pengolahan, dan penggunaan kembali secara terbatas dari lumpur yang telah diproses, sangat penting dilakukan untuk mengurangi pencemaran air tanah secara luas yang berasal dari sistem sanitasi rumah tangga yang tidak aman/rusak.

Unit Pengelola Air Limbah Perkotaan atau Lembaga Operator

Unit Pengelola Air Limbah Perkotaan atau Lembaga Operator sebagaimana kotak biru adalah elemen terakhir dari kerangka ini yang didedikasikan sebagai "Unit Pengelola Air Limbah Domestik Perkotaan" atau sebagai

lembaga operator yang secara umum dibentuk melalui regulasi dalam bentuk; UPTD, BLUD atau PD dan diberi mandat oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan air limbah dan memberikan layanan berdasarkan pilihan yang tersedia di masyarakat (lihat kotak hijau San-1 ke San-4).

2.3 Kondisi Keberlanjutan yang Diharapkan

"Tata 'pemerintahan yang baik' mewakili dasar untuk pengembangan ketentuan pelayanan publik yang efektif dan efisien."

Kondisi yang ingin diwujudkan melalaui kerangka pengelolaan sanitasi (kerangka kerja SPAL-DP) adalah *accountable governance* (tata kelola pelayanan publik bidang air limbah yang baik) yang didukung dengan aspek lingkungan pendukung dari Pemerintah Daerah yang digambarkan sebagaimana gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2: Tata Kelola Pelayanan Publik

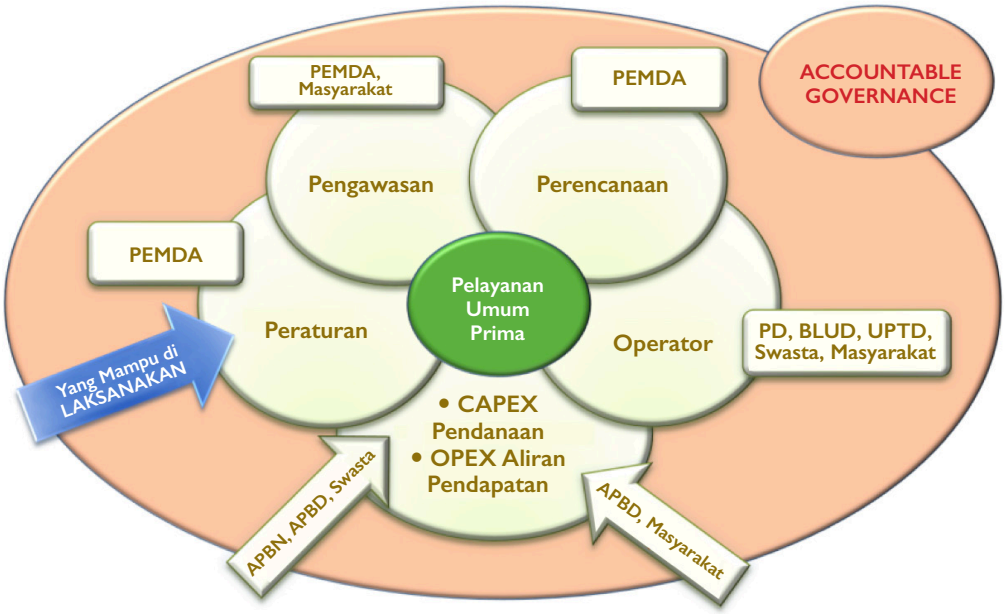

Keberlanjutan pelayanan yang baik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan mencakup:

- Adanya **peraturan** air limbah dari Pemda yang dipatuhi, berorientasi untuk masa mendatang, bisa dijalankan, bersifat terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan SPAL-DP
- Adanya fungsi **pengawasan** oleh Pemda dan masyarakat,
- Adanya tata **perencanaan** yang terpadu untuk mendorong pengembangan pelayanan,
- Adanya mandat **lembaga operator** yang menjalankan fungsi manajemen pengelolaan dan mempertanggung jawabkan atas kinerja pengelolaan air limbah domestik, dan
- Adanya **kapasitas keuangan** meliputi: sumber pendanaan modal (*CAPEX*) dari APBN, APBD, Swasta, donor dll., dan aliran pendapatan APBD dan masyarakat (hasil retribusi) utuk untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan aset.

2.4 Nilai dan Manfaat Bagi Daerah

"Pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki kepentingan bersama terhadap pengelolaan air limbah domestik."

Dalam kerangka kebijakan pembangunan, konsep pengelolaan air limbah domestik perkotaan merupakan sebuah nilai, dan nilai itu akan terwujud jika pemerintah menerapkannya secara utuh dari seluruh prinsip dan langkah-langkah yang direkomendasi-kan. Persoalan air limbah disamping menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah juga menjadi kepentingan bagi masyarakat dan swasta, untuk keterlibatan elemen pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi faktor kunci dalam mewujudkan nilai dari kerangka kerja SPAL-DP bagi pembangunan daerah.

Pendekatan Pengelolaan Air Limbah yang tepat dengan keterlibatan penuh dari ketiga elemen di atas akan dapat menyelesaikan permasalahan air limbah secara "*win-win solution*", artinya setiap upaya mengatasi permasalahan air limbah di daerah kepentingan pemerintah, masyarakat dan swasta akan terakomodasi yang akan melahirkan good

governance di bidang pengelolaan air limbah domestik perkotaan. Nilai yang akan diterima daerah dengan pelaksanaan kerangka kerja SPAL-DP adalah sebagai berikut:

Kinerja Pemda

Pencapaian akses dan mutu layanan Sitem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) yang baik akan menjadikan prestasi daerah selangkah lebih maju dan modern pelakasanaan pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar manusia dan UU yang berlaku di Indonesia.

Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dengan pengelolaan dan pelayanan air limbah domestik yang tepat akan mendorong kepentingan aspek sosial ekonomi masyarakat dan akan berkontrbusi dalam meningkatkan status kesejahteraan masyarakat.

Investasi pemerintah untuk pengelolaan air limbah pada dasarnya akan menghasilkan pengembalian (*return*) yang signifikan - sesuai dengan hasil studi Bank Dunia bahwa, setiap Rupiah yang diinvestasikan di dalm bidang sanitasi yang berkelanjutan menghasilkan 'nilai kembali' sebesar 10 Rupiah.

Keterlibatan Swasta

Pengelolaan air limbah yang baik yang didukung dengan aspek regulasi yang benar akan memberikan kepastian hukum khususnya bagi pihak swasta yang akan berinvestasi di bidang air limbah.

Dengan menerapkan kerangka kerja Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan akan memberikan peluang yang besar bagi daerah atas kehadiran swasta untuk memberikan jawaban terhadap upaya daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan bidang air limbah.

Lingkungan

Pengelolaan air limbah domestik yang benar akan memberikan dampak positif riil terhadap kondisi penyehatan lingkungan dan dan perlindungan lingkungan sekitar kita (fauna dan flora).

Sesuai dengan Surat Edaran LH Desember 2014 masih 75% dari semua badan air di Indonesia tercemar berat akibat air limbah domestik yang tidak dilelola.

2.5 Kerangka Umum Integrasi Gender

"Integrasi gender yang dimaksudkan tidak hanya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan tetapi lebih difokuskan pada adanya pembangian peran diantara laki-laki dan perempuan."

Integrasi gender seharusnya terjadi di semua aspek dalam kegiatan program-program pembangunan termasuk dalam Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP). Integrasi gender yang dimaksudkan tidak hanya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan tetapi lebih difokuskan pada adanya pembangian peran diantara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Pentingnya aspek gender diintegrasikan di dalam Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) adalah agar program-program pembangunan yang dilakukan oleh pengelola SPAL-DP dapat memerikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada target sasaran yag diharapkan.

Target sasaran yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat sebagai penerima manfaat sari system SPAL-DP yang terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak, kelompok lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus. Selain itu untuk mewujudkan tujuan ini para pengelola SPAL-DP juga diharapkan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang konsep integrase gender dalam kegiatan-kegiatan yang didukungnya.

Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) yang mengintegrasikan gender akan senantiasa menggunakan parameter yang biasa dipakai dalam analisis gender yaitu APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat). Parameter ini dikembangkan untuk melihat aspek penting dari integrasi gender dalam bentuk indikator yang mudah diukur. Sebuah alat Tilik Gender

(*Gender Checklist*) dapat digunakan untuk membantu melihat keberhasilan integrasi gender dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP).

Buku Toolkit Sanitasi ini akan terdiri dari 5 buku yang dan di dalam setiap buku akan dijelaskan bagaimana aspek gender akan diintegrasikan serta melihat beberapa contoh analisis yang menggunakan parameter APKM.

Analisis ini selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga operator UPTD. Untuk itu diperlukan kajian yang regular baik secara tahunan maupun lima tahunan untuk mengkaji perkembangan pencapaian integrasi gender serta menyesuaikan perkembangan pelaksanaan SPAL-DP.

Promosi perubahan perilaku untuk mendorong akses pelayanan sanitasi komunal

BAB 3 PELAKSANAAN KERANGKA KERJA SPAL-DP

Pelaksanaan Kerangka Kerja SPAL-DP mencakup serangkaian kegiatan sejak internalisasi kerangka kerja dan prinsip keberlanjutan oleh pemangku kebijakan dan pejabat teknis sampai dengan pelaksanaan (operasionalisasi) oleh Lembaga Operator.

Rangkaian kegiatan secara keseluruhan di laksanakan dalam 4 bagian termasuk:

- Internalisasi Kerangka Kerja & Prinsip Keberlanjutan,
- Penyusunan Rencana Operasional Pencapain Cakupan dan Mutu Pelayanan,
- Penydiaan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SPAL-DP, dan
- Pelaksanaan SPAL-DP oleh Lembaga Operator, sebagaimana gambar 3 seperti berikut:

Gambar 3 Bagan Alir Pelaksanaan Kerangka Kerja SPAL-DP

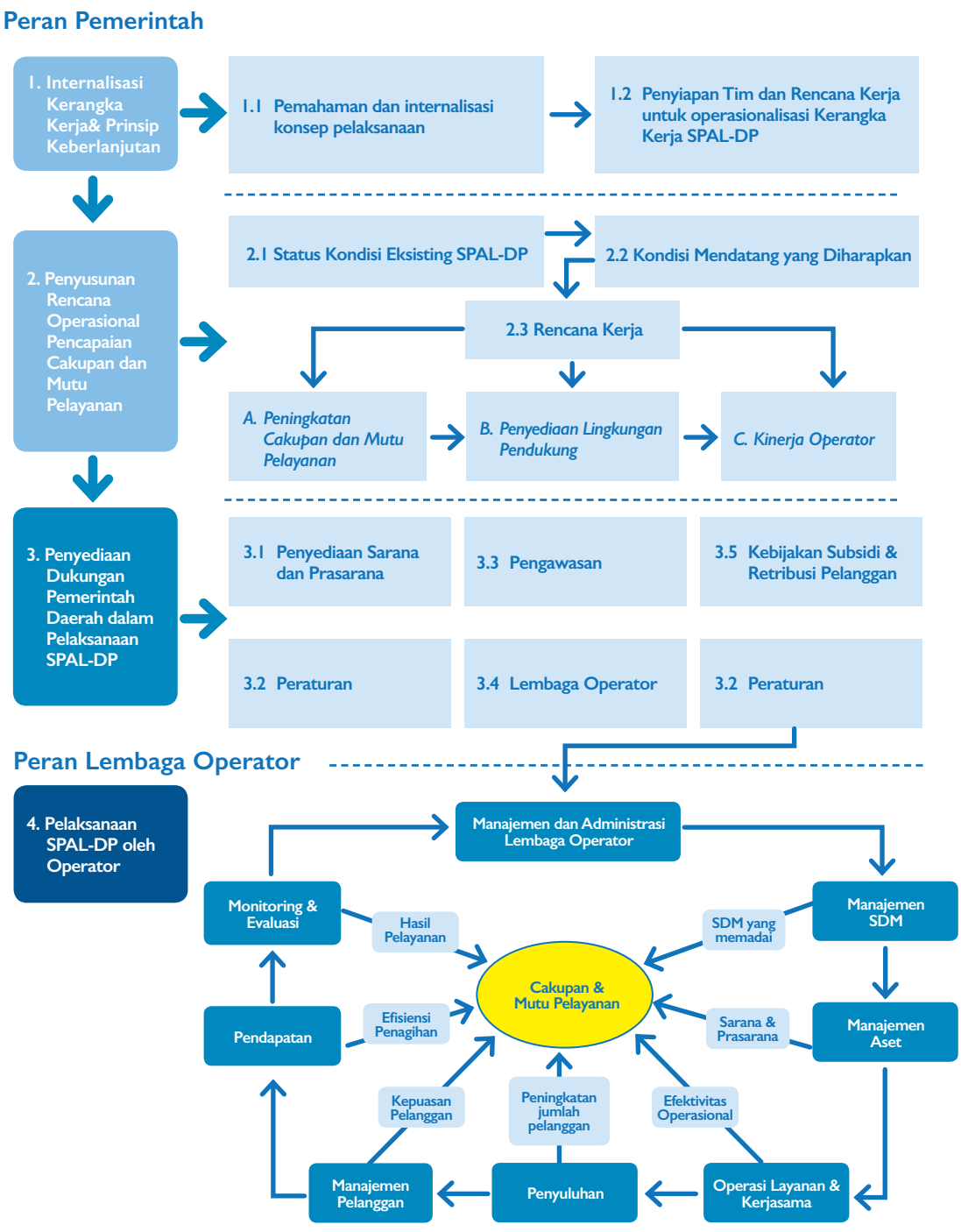

BAB 3 PELAKSANAAN KERANGKA KERJA SPAL-DP

Rangkaian kegiatan sebagaimana gambar 3 diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam uraian yang lebih rinci mencakup tujuan atau sasaran masing-masing tahapan, bentuk dan tujuan intervensi serta hasil dan indikator masing-masing sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1 Matrik Kegiatan Operasionalisasi "Menuju Kinerja Pelayanan SPAL-DP"

Sasaran	Intervensi	Tujuan Intervensi	Hasil Dan Indikator
1. Internalisasi Kerangka Kerja dan Prinsip Keberlanjutan			
1.1. Pemahaman dan internalisasi konsep pelaksanaan	Komunikasi, Audiensi, Advokasi	› Memberikan pemahaman secara utuh pemangku kebijakan dan pejabat teknis mengenai kerangka dan prinsip keberlanjutan SPAL-DP › Mendorong minat dan komitmen daerah untuk adopsi kerangka kerja SPAL-DP	**HASIL** › Pemahaman yang baik pemangku kebijakan dan pejabat teknis tentang kerangka kerja SPAL-DP › Minat dan komitmen untuk adopsi kerangka kerja SPAL-DP **INDIKATOR** › Surat Minat Adopsi dari pimpinan daerah › Penetapan sasaran pembangunan air limbah dalam RPJMD/Renstra SKPD
1.2. Penyiapan Tim dan Rencana Kerja untuk operasionalisasi Kerangka Kerja SPAL-DP	Bantuan teknis (pendampingan langsung)	Memberikan bantuan teknis kepada daerah dalam: › Penyiapan tim yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan kerangka kerja SPAL-DP › Menyiapkan rencana tindak untuk adopsi kerjangka kerja SPAL-DP	**HASIL** › Rencana kerja tim untuk menindaklanjuti minat adopsi kerangka kerja SPAL-DP **INDIKATOR** › Kegiatan yang akan dilakukan › Target waktu › Pihak-pihak yang dilibatkan dan pembagian peran
2. Penyusunan Rencana Operasional Pencapaian Cakupan dan Mutu Pelayanan			
2.1. Kajian Status Kondisi Eksisting SPAL-DP **2.2. Penetapan Kondisi Mendatang yang Diharapkan** **2.3. Penyusunan Rencana Kerja Operasional SPAL-DP**	Bantuan Teknis, Fasilitasi	Memberikan bantuan teknis dan penguatan kapasitas kepada Pemda (SKPD) dalam penyiapan rencana operasional pencapaian target cakupan dan mutu pelayanan meliputi: › Menetapkan status kondisi eksisting SPAL-DP › Menetapkan target kondisi mendatang yang diharapkan dalam pengelolaan SPAL-DP › Menetapkan langkah kegiatan yang akan dilakukan	**HASIL** › Pemahaman terhadap arah dan tujuan yang akan dicapai dalam adopsi kerangka kerja SPAL-DP › Status kondisi eksisting dan isu/ permasalahan yang akan dijawab yang disepakati bersama › Target kondisi mendatang yang disepakati › Langkah kegiatan, kebutuhan biaya, dan distribusi peran antar pihak yang disepakati **INDIKATOR** › Data cakupan SPAL-DP terkini yang akurat › Jumlah pihak yang terlibat dalam penyepakatan rencana operasional › Dokumen Road Map yang disepakati dan didukung aspek legal

Sasaran	Intervensi	Tujuan Intervensi	Hasil Dan Indikator
3. Penyediaan Dukungan Pemda dalam Pelaksanaan SPAL-DP			
3.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana **3.2 Penyiapan Peraturan** **3.3 Penyiapan Lembaga Pengawas** **3.4 Penyiapan Lembaga Operator** **3.5 Kebijakan subsidi dan retribusi pelanggan**	Bantuan Teknis, Fasilitasi	Memberikan bantuan teknis dan penguatan kapasitas dalam proses penyiapan dukungan Pemda dalam pelaksanaan SPAL-DP mencakup: › Penyiapan pertaturan › Penyiapan lembaga pengawas dan Lembaga Operator termasuk penetapan tupoksinya › Penyiapan kebijakan subsidi dan retribusi	**HASIL** › Pemahaman yang baik dan komitmen pemangku kebijakan dan pejabat teknis untuk menyediakan dukungan yang dibutuhkan untuk SPAL-DP › Tersedianya (terbentuknya): - Peraturan SPAL-DP yang bisa dilakukan - Lembaga dan fungsi pengawasan untuk SPAL-DP - Lembaga Operator - Kebijakn subsidi dan retribusi pelanggan **INDIKATOR** › Perda/Perwal/Perbub tentang pengelolaan air limbah domestik › Perwal/perbub/SK pembentukan dan TUPOKSI lembaga pengawas dan Lembaga Operator › Perwal/perbub/SK tentang subsidi dan retribusi pelanggan › Jumlah alokasi APBD untuk SPAL-DP
4. Pelaksanaan SPAL-DP oleh Lembaga Operator			
4.1 Manajemen dan administrasi lembaga operator **4.2 Kinerja manajemen SDM** **4.3 Kinerja manajemen aset** **4.4 Kinerja operasi pelayanan, kerjasamana dengan swasta dan kelompok masyarakat** **4.5 Penyuluhan masyarakat** **4.6 Kinerja manajemen pelanggan** **4.7 Kinerja manajemen keuangan** **4.8 Evaluasi kinerja pelayanan**	Bantuan Teknis Fasilitasi, Pelatihan, Studi Banding	Memberikan bantuan teknis dan penguatan kapasitas (kompetensi) lembaga operator dalam menjalankan Tupoksinya untuk pelayanan air limbah kepada masyarakat mencakup: › Kapasitas manajemen dan administrasi › Kapasitas pengelolaan SDM › Kapasitas operasi sarpras dan kemitraan dengan swasta dan masyarakat › Kapasitas penyuluhan dan pengelolaan pelanggan › Kapasitas pengelolaan pendapatan dan › Kapasitas dalam monev dan pelaporan kinerja	**HASIL** › Pelayanan yang memenuhi standar dan mutu pelayanan (UU No. 23 tahun 2014) › SDM yang berkompetensi › Efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana › Peningkatan jumlah pelanggan › Kepuasan pelanggan › Efisiensi pengelolaan keuangan › Kinerja hasil pelayanan sesuai yang diharapkan **INDIKATOR** › Struktur organisasi manajemen dan kelengkapan administrasi sesuai dengan Topoksi › Sedia sistem pengelolaan SDM › Sedia sistem pengelolaan aset operasi pelayanan › Sedia konsep kerjasama dengan instansi pemerintah, wira usaha sanitasi serta kelompok masyarakat › Sedia sistsem pengelolaan penyuluhan pelayanan dan fungsi pengelolaan pelanggan › Sedia sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan › Sedia istem laporan kinerja pelayanan kepada SKPD.

Staf UPTD PAL Gresik sedang inspeksi IPLT

BAB 4 RINGKASAN BUKU PANDUAN

"Buku Panduan disiapkan sebagai alat bantu fasilitasi."

Panduan Sanitasi ini disusun sebagai piranti atau alat bantu proses internalisasi dan fasilitasi operasionalisasi dari KERANGKA menuju KINERJA pencapaian layanan SPAL-DP di daerah dan digunakan untuk memandu petugas dalam memberikan bantuan teknis tahap demi tahap, mulai dari membangun pemahaman dan kesadaran untuk mendapatkan dukungan politis, proses penjabaran kerangka ke dalam rencana kerja tim di daerah, pendampingan dalam perencanaan SPAL-DP dan penyediaan dukungan yang diperlukan dari pemda, serta pengelolaan pelayanan SPAL-DP oleh lembaga operator. Ringkasan isi buku panduan adalah sebagai berikut:

Buku 1: Penjelasan Umum Pengembangan SPAL-DP

Sebagaimana dijelaskan dalam daftar buku pada halaman 1, Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai konsep kerangka kerja SPAL-DP dan bagaimana konsep ini dioperasionalkan oleh daerah untuk mencapai kinerja pelayanan, serta menjaaskan panduan-panduan yang digunakan dalam pendampingan kepada daerah. Isi buku 1 mencakup

- **Konsep** SPAL-DP
- Proses **Operasionalisasi** Kerangka Kerja SPAL-DP
- **Panduan** yang digunakan
- **Ringkasan** isi 5 buku panduan

Dengan membaca buku 1 secara keseluruhan, diharapkan pembaca telah cukup memiliki gambaran umum mengenai konsep kerangka kerja dan urgensinya bagi daerah, nilai manfaat yang akan didapatkan. Di samping itu, pembaca juga memiliki gambaran: apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang perlu dilakukan khususnya oleh SKPD dalam mengorganisir dan mengawal proses pelaksanaannya, sehingga nilai yang ditawarkan serta tujuan dari kerangka kerja SPAL-DP ini akan terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh daerah.

Buku 2: Panduan Advokasi Pendapingan Daerah dalam Pengembangan SPAL-DP

Sebagaimana dijelaskan dalam daftar buku pada halaman 1,Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai proses penjaminan kualitas pelaksanaan kerangka kerja SPAL-DP untuk memastikan konsep pelaksanaan diadopsi secara utuh baik oleh pemerintah daerah, SKPD maupun UPTD SPAL-DP. Buku ini menjadi buku penunjang dari buku 3, 4 dan 5 dengan ruang lingkup isi mencakup:

- **Konsep** Advokasi dalam Pelaskasnaan SPAL-DP
- **Kerangka Kerja** Advokasi Pelaksanaan SPAL-DP
- Advokasi untuk **Pengambil Kebijakan** Daerah
- Advokasi untuk **SKPD**
- Advokasi untuk **Lembaga Operator-UPTD**

Konsep advokasi yang dijelaskan dalam buku ini adalah memengaruhi dan mendorong pemangku kepentingan melalui kegiatan komunikasi, bantuan teknis, fasilitasi dan kegiatan penguatan kapasitas dalam suasana kemitraan untuk memastikan, susbtansi dan prinsip dari kerangka kerja SPAL-DP terjaga dan diwujudkan/dilaksanakan dalam seluruh rangkaian proses adopsi.

Dengan demikian kualitas pemahaman, kualitas perencanaan dan kualitas proses pelaksanaan serta kualitas hasil kegiatan akan memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pengelolaan SPAL-DP di daerah.

Buku 3: Panduan Penyusunan Roadmap SPAL-DP

Sebagaimana dijelaskan dalam daftar buku pada halaman 1, Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai proses penyusunan Rencana Operasional secara menyeluruh dalam rangkan pencapaian kinerja pelayanan SPAL-DP oleh Pemerintah Daerah berangkat dari kondisi eksisting sebagai dasar penetapan target kondisi mendatang yang diharapkan serta gambaran strategi, program dan kegiatan. Isi buku mencakup:

- Kajian **Kondisi Eksisting** Pengelolaan SPAL-DP
- **Penetapan Target** Kondisi SPAL-DP Yang Diharapkan Mendatang

- Rencana Kerja **Operasional Pencapaian** Kondisi SPAL-DP yang Diharapkan Mendatang

Konsep Road Map yang dijelaskan dalam buku ini adalah rencana operasional daerah yang terukur dengan langkah sistematis untuk mencapai kondisi mendatang yang diharapkan khususnya dalam pencapaian taget cakupan dan mutu pelayanan bidang air limbah domestik di perkotaan. Road Map SPAL-DP ini bersifat melengkapi perencanaan sanitasi yang telah ada di daerah yang di dalamnya juga mencakup bidang persampahan dan drainase.
Diantara buku panduan lainnya, buku ini menjadi acuan dalam memandu daerah untuk menterjemahkan dari kerangka kerja menjadi kinerja pengelolaan air limbah domestik perkotaan, dan Road Map yang teah disusun sebagai acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian target dan mutu pelayanan

Buku 4: Panduan Penyediaan Dukungan Pemerintah dalam Pengembangan SPAL-DP

Sebagaimana dijelaskan dalam daftar buku pada halaman 1, Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai dukungan dari Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untuk efektivitas pengelolaan air limbah domestik perkotaan mencakup aspek peraturan, perencanaan, pengawasan, lembaga operator dan kebijakan subsidi fan retribusi. Isi buku ini mencakup:

- Penyediaan **Peraturan** Pengelolaan SPAL-DP
- **Rencana Operasional** Pencapaian Kinerja SPAL-DP
- **Pengawasan Kinerja** Penyelenggaraan SPAL-DP
- Pembentukan **Lembaga Operator** pelayanan air limbah domestik
- Kebijakan **Subsidi/Retribusi Pelayanan** SPAL-DP

Konsep lingkungan pendukung yang dijelaskan dalam buku ini adalah bentuk/wujud nyata dukungan dari Pemerintah Daerah dalam memastikan pengelolaan SPAL DP akan menjacapai tujuan dan kinerja pelayanan secara berkelan-jutan. Lingkungan pendukung yang disiapkan Pemerintah

Daerah merupakan modal/pondasi dasar mantapnya sistem pengelolaan SPAL-DP di masa mendatang. Dengan demikian buku 4 ini pada prinsipnya merupakan bangunan sistem yang berorientasi kebutuhan masa mendatang.

Buku 5: Panduan Operasional Pelayanan SPAL-DP

Sebagaimana dijelaskan dalam daftar buku pada halaman 1, Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai aspek manajemen Lembaga Operator dalam menjalankan TUPOKSI nya sebagai lembaga operator dalam rangka memenuhi target kinerja khususnya dalam pencapaian cakupan dan mutu pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat. Buku ini menuntun kepada Lembaga Operator mengenai upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan mandatnya, isi buku ini mencakup:

- **Konsep** Lembaga Operator UPTD dalam pengelolaan SPAL-DP: Mandat, Tupoksi, Standar Pelayanan, Hak dan Kewajiban dan, Kerangka kerja
- **Kompetensi** Lembaga Operator UPTD dalam Pengelolaan SPAL-DP: Manajemen dan Administrasi, Manajemen SDM, Manajemen Aset, Manajemen Pelanggan, Manajemen Keuangan, Pelaporan Kinerja Pelayanan

Konsep operasionalisasi pelayanan SPAL-DP yang dijalaskan dalam buku ini adalah bagaimana lembaga operator dalam menjalankan tupoksinya secara efektif dimulai dari proses pemahaman terhadap tupoksi dan kerangka kerja SPAL-DP termasuk standar pelayanan, bagaimana menjadikan lembaga operator memiiki kesiapan dari aspek manajemen dan administrasi, menjalankan fungsi manajemen SDM, operasi aset dan kemitraan dengan swasta dan masyarakat, penyuluhan dan pengelolaan pelanggan, pengelolaan pendapatan dan menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi internal serta pelaporan kinerja kepada Pemerintah Daerah. Dengan kata lain buku ini untuk mendorong lembaga operator memahami tupoksi, memahami dan mampu menjalankan tupoksi untuk mencapai target kinerja yang diamanatkan.

INDONESIA URBAN WATER SANITATION AND HYGIENE
Mayapada Tower 10th Fl
Jln. Jend. Sudirman Kav.28
Jakarta 12920

Tel. +62-21-522 - 0540
Fax. +62-21-522 - 0539

www.iuwash.or.id

USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

iuwash
Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene